

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Profil Desa Pladen

a. Sejarah Desa Pladen

Desa Pladen merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Kudus. Menurut para sesepuh dan tokoh masyarakat, pada zaman dahulu kala, seorang santri atau ulama bernama Makhdum Notokusmo Aji yang merupakan seorang pejabat tinggi dari kerajaan Mataram Islam berguru kepada Sunan Muria dan menjadi murid kesayangan dari Sunan Muria. Dengan penuh kesabaran, ketekunan, serta tawaduknya kepada Sunan Muria, Makhdum Notokusmo Aji kemudian diberikan nama baru yakni Samsudin Abdul Malik. Seiring berjalannya waktu, Makhdum Notokusmo Aji kemudian dijadikan sebagai santri abdi dalem. Dengan statusnya sebagai santri abdi dalem Makhdum Notokusmo Aji mempunyai kewajiban untuk melayani atau ngladeni semua kebutuhan dan keinginan Sunan Muria atau juga disebut sebagai tangan kanan untuk menjalankan segala perintah dari sang guru.

Sesudah merasa ilmunya sudah cukup kemudian Makhdum Notokusmo Aji ditugaskan untuk berdakwah untuk meng-Islamkan suatu daerah di sebelah tenggara Gunung Muria dan berhasil meng-Islamkan para masyarakatnya. Singkat cerita, wilayah kediaman dan tempat berdakwa Makhdum Notokusmo Aji dinamakan Pladen (Pladen atau Pelayan). Mengingat karena tokoh desa tersebut (Makhdum Notokusmo Aji) yang dulu nyantri kepada Sunan Muria menjadi laden/abdi/pelayan sang guru. Oleh karena itu seiring berjalannya waktu desa ini disebut dengan nama Pladen yang mempunyai arti melayani atau meladeni.

b. Kondisi Geografis Desa Pladen

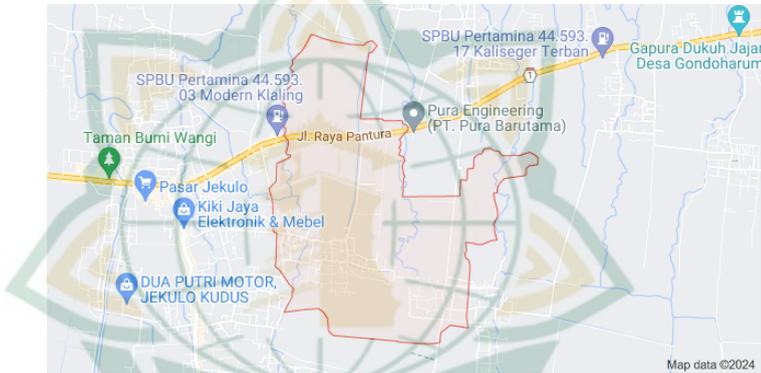
Desa pladen merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan jekulo, kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Desa pladen terletak di bagian Timur kabupaten Kudus. Jarak tempuh desa pladen dari pusat Pemerintah Kabupaten Kudus kurang lebih 13 km. Sedangkan dari pusat Kecamatan Jekulo kurang lebih berjarak 2 km. Desa Pladen memiliki luas wilayah 331,1 Ha terdiri dari tanah sawah dan

63.890 Ha wilayah darat.¹ Desa Pladen berbatasan dengan beberapa wilayah desa sebagai berikut:

- 1) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Klaling.
 - 2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidomulyo.
 - 3) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Terban.
 - 4) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bulung Kulon
- Desa pladen terbagi menjadi dua Dukuh diantaranya yaitu:

- 1) Dusun Jawik dengan 2 RW dan 8 RT
- 2) Dan Dusun Krajan dengan 3 RW dan 13 RT

Gambar 4. 1 Peta Desa Pladen



Sumber: Map data 2024

c. Keadaan Penduduk Desa Pladen

1. Jumlah Penduduk Desa Pladen

Penduduk merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu dan merupakan hasil dari beberapa proses demografi seperti fertilitas dan migrasi. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, Desa Pladen memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.927 jiwa, dengan uraian sebagai berikut:²

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, “Kecamatan Jekulo Dalam Angka 2021,” 2021, 128, [https://bappeda.kuduskab.go.id/document/Kecamatan Jekulo Dalam Angka 2021.pdf](https://bappeda.kuduskab.go.id/document/Kecamatan%20Jekulo%20Dalam%20Angka%202021.pdf).

² DATA SENSUS, “Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Sex Ratio Per Desa Di Kecamatan Jekulo Tahun 2019,” Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2020, <https://kuduskab.bps.go.id/statictable/2020/11/03/215/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-sex-ratio-per-desa-di-kecamatan-jekulo-tahun-2019-orang-.html>.

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Pladen

No.	Kategori	Jumlah
1.	Laki-laki	2.974
2.	Perempuan	2.953
	Jumlah	5.927

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan data yang terdapat pada BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Kudus.

d. Mata Pencaharian Penduduk Desa Pladen

Mata pencaharian merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang sebagai sumber pendapatan atau pekerjaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan maupun kesejahteraan hidupnya dan keluarganya. Dalam sebuah kawasan, daerah maupun desa mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda tergantung dengan kondisi geografis pada masing-masing daerah.³ Oleh karena itu peneliti akan memaparkan hasil daripada mata pencaharian yang berda di Desa Pladen. Sebagai daerah yang mempunyai karakteristik dataran yang subur membuat desa Pladen menjadi sebuah desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hasil dari pertanian tersebut yaitu padi, tebu serta kacang hijau. Selain bermata pencaharian sebagai petani masyarakat desa Pladen juga bekerja sebagai karyawan pabrik, pedagang, polisi, TNI, dan juga guru dan lain sebagainya.

Tabel 4. 2 Mata Pencaharian Desa Pladen

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Petani	1.123	732
Karyawan Swasta	1.032	1.205

³ Valentina Wijayanto, Opan Suwartapradja, and Rina Hermawati, “Perubahan Mata Pencaharian Dan Proses Adaptasi Warga Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede,” *Umbara* 2, no. 2 (2019): 66–77, <https://doi.org/10.24198/umbara.v2i2.20446>.

Pegawai Negeri Sipil dan Guru	30	95
Pengusaha Menengah dan Kecil	112	398
Peternak	42	15
TNI	5	1
Montir	27	0
Polri	7	0

Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Pladen

e. Keadaan Sosial dan Agama Desa Pladen

Di setiap desa sudah semestinya mempunyai sarana dan prasarana serta fasilitas untuk mengembangkan serta memajukan visi dan misinya, dengan adanya fasilitas yang memadai dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan sebuah desa. fasilitas-fasilitas tersebutlah yang juga dimiliki Desa pladen.

Tabel 4. 3 Sarana dan Prasarana Sosial Keagamaan

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Gedung Aula Desa	1
2.	Masjid	3
3.	Tempat Pemakaman	7
4.	Musholla	10
5.	Lapangan Desa	1
6.	Mobil Operasional Desa	1

Sumber : Diolah peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa.

f. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pladen

Struktur organisasi memegang peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi. Struktur organisasi juga mempengaruhi kualitas pelayanan. Struktur organisasi merupakan alat pengukur tingkah laku manusia untuk meningkatkan tujuan bersama kegiatan agar organisasi yang dilaksanakan agar mendapat pelayanan publik yang baik.⁴ Oleh karena itu, struktur organisasi pemerintahan desa merupakan suatu organisasi yang dibentuk secara formal untuk menjalankan kekuasaan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Struktur organisasi desa mempunyai tugas serta fungsinya masing-masing berdasarkan pada Permendagri No. 84 tahun 2015.⁵ Struktur organisasi pemerintah desa mempunyai wewenang masing-masing dan untuk menjalankan tugas serta perannya para aparatur desa harus melayani secara maksimal pada pelayanan publik untuk masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan desa. berikut ini adalah struktur organisasi yang berada di pemerintahan desa Pladen.

Tabel 4. 4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pladen

No.	Nama	Jabatan
1.	Ely Widiastuti	Kepala Desa
2.	Mawar Kuncoro	Sekretaris Desa
3.	Nurul Khiriyah	Kasi Urusan Tata Usaha dan Umum
4.	Aulia Rif'atul Rahayu	Staf TU
5.	Sumardino	Kepala Urusan Keuangan
6.	Kamal Mustofa	Kepala Urusan Perencanaan

⁴ M Ridwan Caesar et al., "Jurnal Ilmiah 'Neo Politea' Fisip Universitas Al-Ghifari Analisis Peran Struktur Organisasi Dalam Kualitas Pelayanan Publik Di Desa Gudang Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang," *Jurnal Ilmiah "Neo Politea" FISIP Universitas Al-Ghifari* 2, no. 1 (2021): 12–22, file:///C:/Users/MYBOOK/14F/Downloads/284-458-3-PB.pdf.

⁵ Sugiman, "Pemerintah Desa," *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* 7, no. 1 (2018): 82–95, <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>.

7.	Dyah Noor R	Kasi Pemerintahan
8.	Nurul Hidayah	Staf Kasi Pemerintahan
9.	Tri Setyorini	Kasi Kesejahteraan
10.	Enik Agus Novianti	Staf Kasi Kesejahteraan
11.	Rifqi Nur Mahmudah	Kasi Pelayanan
12.	Rohadi	Staf Kasi Pelayanan
13.	Moh. Isnaeni	Kadus Krajan
14.	Sandi	Kadus Jawik

Sumber: Diolah berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dengan perangkat desa

g. Lembaga Pendidikan Yang Berada Di Desa Pladen

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi tolak ukur serta menempatkan negara sebagai negara terbelakang atau berkembang dan juga sebagai negara maju.⁶ Semakin berkembang pendidikan suatu negara, maka pendidikan tersebut akan semakin besar dan canggih. Negara akan maju dan berkembang jika masalah Pendidikan diprioritaskan sebagai kunci pembangunan. Baik negara besar maupun Negara berkembang menyadari bahwa pengembangan mengenai pendidikan harus benar-benar menjadi prioritas utama.

Peran pendidikan sangat penting dan mempunyai pengaruh yang besar untuk karier.⁷ Bukan hanya itu saja, dalam mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) handal yang tidak hanya mampu bersaing secara sehat, namun Pendidikan juga dapat menumbuhkan rasa memiliki yang lebih kuat terhadap orang-orang disekitarnya.

⁶ Nizmah Maratos Soleha Yayan Alpian, M.Pd Sri Wulan Anggraeni, M.Pd., Unika Wiharti., "Pentingnya Pendidikan Bagi Mnesia" 1, no. 2 (2019): 66–72, <https://core.ac.uk/download/pdf/322468617.pdf>.

⁷ N Devi, *Pentingnya Pendidikan Untuk Masa Depan* (victory pustaka media, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=Bkb6EAAAQBAJ>.

Pendidikan bukanlah suatu kegiatan yang sembarangan, karena akan berdampak pada kehidupan sosial dan spiritual anak manusia, kehidupan dan nasibnya sebagai makhluk yang bermartabat dan mempunyai hak asasi manusia. Hal ini didukung dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang terencana dan sadar untuk menciptakan suasana dan proses belajar agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, budi pekerti, kecerdasan, dan lain-lain.⁸ Berikut merupakan data Pendidikan yang berada di Desa Pladen secara lengkap dalam tabel berikut ini:⁹

Tabel 4. 5 Jumlah Instansi Pendidikan yang Ada di Desa Pladen

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Nama Instansi Pendidikan
1.	PAUD	1	Dewi Sartika
2.	RA	2	Tarbiyatul Aulad Salafi Raudlotus Sholihah
3.	TK	1	TK Pertiwi
4.	MI	1	MI NU Tamrinus Sibyan
5.	SD	3	SD 1 PLADEN SD 3 PLADEN SD 4 PLADEN
6.	TPQ	1	Tarbiyatul Aulad

⁸ Yayan Alpian, M.Pd Sri Wulan Anggraeni, M.Pd., Unika Wiharti., "Pentingnya Pendidikan Bagi Mnesia."

⁹ Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, "Data Pokok Pendidikan," 2023, <https://dapo.kemdikbud.go.id/pd/3/031906>.

Sumber: Data diolah peneliti berdasarkan data Kemdikbud

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Partisipasi Perempuan dalam Pilkada Di Kabupaten Kudus Tahun 2019

Isu maupun berita mengenai kesetaraan gender semakin hari semakin berkembang dan semakin digencarkan. Dalam perspektif Islam, kesetaraan gender mengacu pada prinsip bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai nilai yang sama. Banyak penafsiran kontekstual yang beranggapan bahwa Al-Qur'an memberikan hak yang lebih kepada laki-laki dibandingkan perempuan.

Timbulnya ketidakadilan terhadap perempuan dengan menampikkan agama disebabkan oleh pelaksanaan yang salah satu ajaran agama yang disebabkan oleh faktor sejarah, lingkungan budaya, pengaruh tradisi patriarki dalam masyarakat, dan sikap *affects* (mempengaruhi) yang dihasilkan oleh tindakan yang ditentukan secara turun temurun hingga generasi mendatang. Yang mengakibatkan ketimpangan dan ketidaksetaraan gender. Hal ini menimbulkan mitos-mitos palsu yang disebarkan melalui nilai-nilai dan kesalahpahaman ajaran agama mengenai superioritas laki-laki dan lemahnya perempuan.¹⁰

Meskipun pandangan tentang "kesetaraan yang tidak setara" ini mungkin telah diterima di zaman pra-modern dan mungkin konsisten dengan konteks makro pada masa itu, akan tetapi setelah perkembangan zaman penafsiran kontekstual berpendapat bahwa saat ini penafsiran konteks makro berbeda secara signifikan.

Alimatul Qibtiyah menerangkan pemahaman Islam mengenai gender kedalam tiga bagian.¹¹ Yang pertama yaitu literalis. Menurut golongan ini seorang istri harus patuh terhadap suami, istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual misalnya. Literalis juga menganggap bahwa feminisme dan kesetaraan gender merupakan produk perempuan Barat yang menginginkan dirinya lepas dari laki-laki. Orang-orang literalis

¹⁰ Maslamah dan Suprapti Muzani, "Konsep-Konsep Gender Menurut Perspektif Islam," *Jurnal SAWWA* 9, no. 2 (2014): 275–86.

¹¹ Qibtiyah, "Alimatul Qibtiyah - Sensitivitas Gender Dan Asertivitas Berkomunikasi Dalam Berdakwah."

selalu menekankan pada aspek normatif-teologis, dimana perempuan harus begini dan bukan begitu dan laki-laki harus begitu dan begini. Golongan literalis cenderung mempertahankan patriarki atau pandangan tradisional mengenai gender dan golongan ini lebih mengarah pada penolakan adanya kesetaraan gender.

Yang kedua moderat, orang-orang moderat merupakan campuran antara Islam pribumi dengan NU dan juga Muhammadiyah. Golongan yang mempunyai komitmen dan mengupayakan adanya lingkungan yang adil, tanpa memihak pada jenis kelamin tertentu. Kelompok ini menerima ide-ide pembaru pemikir dari barat, termasuk feminisme dan gender selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Mereka lebih mengutamakan dialog secara terbuka dan Tindakan yang berkelanjutan dalam mengupayakan kesetaraan gender yang besar. Golongan ini juga tidak mengartikan teks keagamaan secara literal akan tetapi mereka menyesuaikan perkembangan zaman.

Yang ke tiga adalah progresif, kelompok progresif memaknai teks-teks keagamaan secara kontekstual. Di mana golongan progresif ini berusaha untuk menutupi apa yang belum bisa dijawab oleh kelompok moderat yang terkesan mengambil jalur aman. Golongan progresif memperjuangkan danya kesetaraan gender. Mereka mendukung adanya kesamaan hak dalam sosial, politik, hukum dan lainnya tanpa melihat suatu gender. Bagi kelompok progresif perbedaan fisik perempuan dan laki-laki seharusnya tidak membedakan mereka secara budaya dan sosial. *Mutual partnership* atau kemitra sejajaran menghendaki adanya persamaan sepenuhnya antara perempuan dan laki-laki baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Golongan ini juga mendorong adanya pemberantasan stereotip gender atau yang dapat menghambat perempuan untuk maju dan mengembangkan dirinya.

Sedangkan Prof. Siti Musdah Mulia memandang gender sebagai kesempatan yang sama dalam hal ketaqwaan. Seperti yang sudah diterangkan dalam QS. Al-Hujrat ayat 13 dan QS. Al-Baqarah ayat 35. Dimana kedua ayat tersebut menjelaskan dan menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama sebagai seorang hamba dalam bertaqwa dan menjauhi larangan yang diberikan Allah SWT tanpa

memandang gender.¹² Gender juga diartikan sebagai kelompok yang melibatkan identitas, peran, dan pengalaman sosial individu di masyarakat, tanpa adanya diskriminasi pada jenis kelamin.

Adanya ketimpangan yang diperoleh dari salah satu gender merupakan permasalahan yang harus diatasi bahkan dihentikan. Mansour Fakih memberikan dua cara untuk menghentikan adanya ketidakadilan yang diperoleh dari salah satu gender, khususnya yang biasa dilalui oleh perempuan.¹³

Pertama yaitu jangka pendek, dilakukan dengan memberikan pendidikan dan kesadaran mengenai pemahaman tentang kesetaraan gender dan mengajak masyarakat untuk menghargai hak semua orang tanpa memandang gender tertentu. Penanganan jangka pendek ini juga untuk memberikan pemahaman perempuan dalam mengatasi masalahnya, karena perempuanlah merupakan jenis gender yang banyak terkena pelecehan yang berasal dari ketimpangan dan ketidakadilan gender. Misalnya dalam mengatasi stereotip, kekerasan bahkan pelecehan perempuan harus bisa melakukan penolakan dan tindakan tegas kepada pelaku yang akan memberikan kekerasan pada mereka sehingga kekerasan tersebut dapat dihentikan.

Kedua yaitu jangka panjang, adanya strategi untuk memperkuat strategi jangka pendek. Bentuk strategi jangka panjang ini seperti adanya kampanye mengenai kesetaraan gender dan juga melakukan advokasi, serta menekan pemerintah maupun lembaga terkait untuk mendukung kebijakan kesetaraan gender dan mengubah kebijakan yang mendiskriminasi salah satu gender.

Sesuai konstitusi, baik perempuan maupun laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945, hak warga Negara dan penduduk untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, baik lisan maupun tulisan, diatur dengan undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara kita adalah negara demokrasi yang memberikan ruang partisipasi

¹² Fajrussalam et al., "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Musdah Mulia."

¹³ Arbain, Azizah, and Sari, "PEMIKIRAN GENDER MENURUT PARA AHLI: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakih."

sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk kaum perempuan.¹⁴

Partisipasi masyarakat dalam menyukseskan demokrasi yang ada di Negara Indonesia merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara yang baik. Dalam pilpres maupun dari tingkat terkecil seperti Pilkades, wajib bagi seorang warga negara yang memenuhi syarat untuk ikut menyukseskan proses demokrasi tersebut. Wujud dari menyukseskan proses demokrasi bukan hanya tidak golput akan tetapi ikut maju menjadi kandidat untuk dipilih juga merupakan bentuk dari perwujudan demokrasi.

Partisipasi perempuan untuk turut andil maju dalam perpolitikan merupakan sebuah permasalahan yang selalu digencarkan. Terdapat jaminan hukum untuk partisipasi perempuan dalam politik yaitu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Akan tetapi masih kurangnya partisipasi perempuan untuk maju ke dunia politik yang merupakan permasalahan yang sering kali terjadi.

Partisipasi perempuan dalam demokrasi bisa dilihat dari beberapa bagian. Pertama bisa dilihat dari pemilih perempuan, kedua penyelenggara pemilu perempuan, ketiga dari peserta pemilu perempuan, keempat bisa dilihat dari pengguna hak pilih, dan yang terakhir yaitu berdasarkan pada perempuan anggota dewan yang terpilih. Dari bagian-bagian tersebut kita bisa lihat seberapa besar tingkat partisipasi perempuan dalam demokrasi.¹⁵

Pada masa pemilihan kepala desa di Kabupaten Kudus tahun 2019 mempunyai permasalahan yang dinilai sama dengan pemilihan kepala desa pada tahun sebelumnya. Kurangnya partisipasi politik perempuan merupakan salah satu dari permasalahan pilkades yang sering terjadi. Adanya ketimpangan membuat masyarakat beranggapan bahwa sosok perempuan tidak layak menjadi seorang pemimpin. Hal tersebut terbukti pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Kudus pada tahun 2019

¹⁴ I Fauziyah, *GELIAT PEREMPUAN PASCA-REFORMASI; Agama, Politik, Gerakan Sosial* (PT LKiS Pelangi Aksara, 2015), <https://books.google.co.id/books?id=pcpjDwAAQBAJ>.

¹⁵ Desi, "Bawaslu Kudus Ajak Perempuan Aktif Menjadi Pengawas Partisipatif," 2021, <https://kudus.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kudus-ajak-perempuan-aktif-menjadi-pengawas-partisipatif>.

yang diikuti oleh 115 desa hanya terdapat 8 perempuan yang berhasil menjadi seorang kepala desa.¹⁶

Perolehan tersebut mengalami penurunan, pasalnya pemilihan kepala desa pada tahun 2014 di Kabupaten Kudus yang diikuti oleh 116 desa terdapat 12 perempuan yang berhasil memenangkan pilkades di tahun itu. Kepala desa perempuan tersebut meliputi desa Bacin, Garung Lor, Kaliwungu, Nganguk, Glantengan, Melati Lor, Gulng, Temulus, Sambung, Tanjungrejo, Piji dan juga desa Cranggang.¹⁷ Kepemimpinan perempuan juga dapat membuat masyarakat menjadi Makmur dan dinilai berhasil. Hal tersebut terbukti terdapat beberapa kepala desa perempuan yang kembali mencalonkan diri dan terpilih kembali pada pemilu 2019.

Bupati Kudus HM Hartopo juga memberikan dorongan pada masyarakat untuk meramaikan pesta rakyat dengan tidak mempedulikan gender. Karena masa ini merupakan masa dimana emansipasi perempuan yang semakin tumbuh dengan *leadership* perempuan yang semakin unggul. Hal tersebut sesuai dengan penuturan bapak Hartopo.

“sekarang sudah ada emansipasi, Ibu Megawati saja pernah menjadi presiden itu saja barometernya. Karena sekarang juga banyak Menteri perempuan. Jadi gender sudah tidak jadi masalah. Terlebih perempuan sendiri saat ini untuk *leadership* yang banyak diunggulkan. Kadang juga kepemimpinannya tidak kalah baiknya dengan kepemimpinan laki-laki.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya representasi perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Adanya budaya tradisional yang masih berkembang di masyarakat khususnya masyarakat pedesaan, membuat kurangnya partisipasi perempuan dalam politik apalagi yang menyangkut kepemimpinan yang identik dengan laki-laki. Dalam budaya tradisional terdapat adanya stereotip, di mana masyarakat menganggap bahwa perempuan tidak pantas menjadi seorang

¹⁶ Yuliadi Mohammad, “Selamat, Inilah Hasil Pilkades Serentak 2019 Pada 115 Desa Di Kabupaten Kudus,” ISKNEWS.COM, n.d., <https://isknews.com/selamat-inilah-hasil-pilkades-serentak-2019-pada-115-desa-di-kabupaten-kudus/>.

¹⁷ Reporter Redaksi, “Inilah Daftar Kepala Desa Di Kabupaten Kudus Periode 2013,” BETANEWS, 2014, <https://betanews.id/2014/06/inilah-daftar-kepala-desa-di-kabupaten.html>.

pemimpin. Hal tersebut menghambat perempuan untuk mengembangkan dirinya dan maju menjadi seorang pemimpin. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ibu Ely selaku Kepala Desa Pladen.

“Kalau masalah orang tidak suka itu pasti ada mbak, tapi tinggal kita aja mbak fokus untuk memimpin dengan baik dan lebih ke membuktikan. Terserah orang lain mahu bilang apa.”¹⁸

Bukan hanya itu saja, kurangnya partisipasi perempuan dalam politik juga dipengaruhi oleh beban ganda, diskriminasi, violence maupun marginalisasi yang juga mempengaruhi rendahnya partisipasi perempuan. Hal itu sesuai yang disampaikan oleh “AF” masyarakat desa Pladen.

“Adanya pekerjaan rumah atau beban ganda niku (itu) jadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kurange (kurangnya) partisipasi perempuan untuk menjadi seorang pemimpin apalagi menjadi kepala desa perempuan. Terutama niki (ini) kagem (buat) para-ibu-ibu nopo (dan) perempuan ingkang (yang) sampun (sudah) berumah tangga mbak. Ibu-ibu mesti (pasti) berpikir dua kali untuk mengajukan diri sebagai kepala desa. Mereka harus bisa mengatur waktu sedemikian rupa untuk mengurus anak dan rumah tangganya, apalagi beban domestik yang seringkali menjadi pekerjaan wajib yang dikerjakan selama mereka berada di rumah. Pagi-pagi mengurus sarapan, seragam sekolah, nyuci terus (setelah itu) jemput anak sekolah, masak lagi ngangkat jemuran jadi waktune (waktunya) niku (itu) mpun (sudah) telas (habis) di rumah.”¹⁹

Hal tersebut diperkuat oleh “N” masyarakat desa Pladen.

“sebagai ibu rumah tangga biasa nggih (ya) mbak diken (disuruh) nyalon (mencalonkan) seumpama mestine (pasti) kulo (saya) mikirke gaweane ingkang teng dalem (memikirkan pekerjaan di rumah). Nopo maleh (apa lagi) ibu rumahtangga ikang mboten gadah

¹⁸ Ely Widyastuti selaku Kepala Desa Pladen di Desa Pladen, pada 04 januari 2024, jam 08.10-09.30 WIB, Traskip 1.

¹⁹ AF” selaku masyarakat Desa Pladen, di rumah responden pada 02 Februari 2024, jam 19.10-19.53 WIB, Traskip 3.

art wah bendino iku mesti bingung (ibu rumah tangga yang tidak mempunyai asisten rumah tangga itu) koyok (seperti) gangsingan nyandak sembarang (permainan gangsing yang mondar-mandir). Jadi kalau perempuan nggheh ingkang maju dados kepala desa harus mempersiapkan dan mengatur waktu untuk rumah tangga kalah pekerjaan (jadi perempuan yang akan mencalonkan diri harus bisa mengatur waktu). Pemimpin perempuan nak mboten gadah art mesti kabotan (kalua tidak mempunyai asisten rumah tangga itu pasti susah). Menurut saya niku (itu) si mbak faktor penghambatnya.²⁰

2. Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Pladen Tahun 2019-2025

Pemilihan kepala desa dilaksanakan setiap enam tahun sekali, tergantung pada enam tahun masa jabatan kepala desa. Pemilihan kepala desa atau yang biasa disebut pilkades melibatkan secara langsung masyarakat sebagai perwujudan demokrasi yang dilaksanakan di tingkat desa. Pilkades sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya sendiri sesuai dengan pilihan dan hati nuraninya untuk kesejahteraannya. Melalui partisipasi pada proses pemilihan kepala desa, rakyat secara tidak langsung mempelajari politik dan juga proses demokrasi. Dalam partisipasi pilkades atau pemilu lainnya semua warga negara berhak untuk ikut berpartisipasi, tak terkecuali para masyarakat perempuan.

Sebanyak 116 desa dari 123 desa yang berada di Kabupaten Kudus melaksanakan pilkades serentak yang tersebar di 9 kecamatan. Sembilan kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Kaliwungu yang terdapat 15 desa, Kecamatan Jati sebanyak 13 desa, Kecamatan Kota Kudus 14 desa, Kecamatan Undaan 16 desa, Kecamatan Mejobo 8 desa, Kecamatan Gebog sebanyak 10 desa, Kecamatan Bae 10 desa, Kecamatan Dawe 18 desa dan Kecamatan Jekulo sebanyak 12 desa.²¹ Dalam pemungutan suara pemilihan kepala desa tersebut dilaksanakan pada 19 November 2019, serta pelantikan kepala desa dilaksanakan pada 17

²⁰ “N” selaku masyarakat Desa Pladen, di rumah responden pada 02 Februari 2024, jam 20.03-20.44 WIB, Trskip 4.

²¹ Akrom Hazami, “286 Calon Bertarung Di Pilkades Kudus,” detikNews, 2019, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4789882/286-calon-bertarung-di-pilkades-kudus-ada-pasutri-dan-bapak-anak>.

Desember 2019. Dalam pemilihan kepala desa terdapat panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sesuai pada Peraturan Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 pasal 7 mengenai tahapan persiapan pemilihan kepala desa.²²

Sebagai salah satu desa yang melaksanakan pilkades serentak pada tahun 2019, BPD Desa Pladen juga membuat panitia pemilihan kepala desa. Dalam pembentukan panitia pemilihan kepala desa ditargetkan selesai pada bulan September, maksimal pada 17 September 2019.²³ Berkenaan mengenai ketua panitia diwajibkan dari masyarakat desa Pladen yang tidak menjadi perangkat desa, serta anggota panitia seperti sekretaris panitia pilkades bisa juga melibatkan perangkat desa. Akan tetapi BPD desa dianjurkan tidak dari perangkat desa supaya penyelenggaraan pilkades dilaksanakan secara netral dan juga transparan. Sehingga birokrasi tertentu tidak dimanfaatkan sebagai bentuk dukungan untuk salah satu calon. Berikut ini susunan panitia dalam pemilihan kepala desa yang ada di Desa Pladen tahun 2019.

Hal tersebut diperkuat oleh “R” yang merupakan panitia pemilihan kepala Desa Pladen sekaligus sekarang yang menjabat sebagai staf di pemerintahan Desa Pladen.

“Jadi waktu menjadi panitia pemilihan kepala desa itu memang dipilih ingkang mboten (tidak) pegawai balai desa mbak, jadi saya menjadi staf itu tahun sesudah adanya pemilihan. Sebenere (sebenarnya) panitia anggota itu boleh dari perangkat asalkan bukan ketua panitia. Tapi BPD desa memilih tiang (orang) yang tidak menjabat ngoten (gitu) biar transparan dan netral.”²⁴

²² MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, “PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2014,” *Applied Microbiology and Biotechnology* 85, no. 1 (2014): 2071–79, <https://sumbarprov.go.id/images/1490001752-Permendagri-No-112-Tahun-2014-Tentang-Pemilihan-Kepala-Desa.pdf>.

²³ ANTARANews, “Pembentukan Panitia Pilkades Di Kudus Ditargetkan Selesai September,” 2019, <https://www.antarane.ws.com/berita/1059248/pembentukan-panitia-pilkades-di-kudus-ditargetkan-selesai-september>.

²⁴ “R” selaku Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Pladen di Kantor Pemerintahan Desa Pladen, pada 04 Januari 2024, jam 09.45-11.02 WIB, Traskip 2.

Tabel 4. 6 Susunan Panitia Pilkades Desa Pladen Tahun 2019

No.	Nama	Jabatan/Kedudukan
1.	Kusnadi	Ketua
2.	Sunardi	Wakil Ketua
3.	Kamal Mustofa	Sekretaris
4.	Nurhadi	Bendahara
5.	Rohadi	Anggota
6.	Suradi	Anggota
7.	Dyah Noor Rokhmiyati	Anggota

Sumber: diolah berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di Kantor pemerintah Desa Pladen

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 tahun 2015 pasal 11 menyatakan bahwa panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas sebagai berikut:²⁵

- a) Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan serta mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilu.
- b) Merencanakan serta mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat.
- c) Melakukan pendaftaran serta penetapan pemilih.
- d) Mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon.
- e) Menetapkan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan menjadi calon
- f) Menetapkan tata cara pemilu.
- g) Menetapkan tata cara kampanye.
- h) Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan serta serta tempat pemungutan suara.
- i) Melaksanakan pemungutan suara.
- j) Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara serta mengumumkan hasil pemilihan.
- k) Menetapkan calon terpilih.

²⁵ Perda Kabupaten Kudus, “Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015,” no. 62 (2015): 1–9, [https://peraturan.bpk.go.id/Download/10571/Perda 2 ttg. Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/10571/Perda%20Ttg.Pencalonan.Pemilihan.Pengangkatan.PelantikanKepalaDesa.pdf).

l) Melakukan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Sebelum diadakannya pemilihan kepala desa tahapan yang dilakukan terlebih dahulu yaitu melakukan sosialisasi serta pemberitahuan mengenai pembukaan pendaftaran calon kepala desa. Seperti yang dijelaskan oleh saudara “R” selaku anggota dari panitia pemilihan kepala desa Pladen.

“Sebagai panitia pemilihan kepala desa kami mempunyai tugas serta kewajiban yang salah satunya yaitu memberikan informasi utawi woro-woro pada RT maupun RW yang ada di Desa Pladen tentang diadakannya pemilihan kepala desa beserta pendaftaran calon kepala desa sesuai instruksi dari kecamatan dan kabupaten. Pemberian informasi niku tidak hanya melalui RT atau RW tetapi juga terdapat banner yang terdapat di balai desa dan di pojok-pojok (sudut-sudut) jalan yang berkenaan mengenai pemilihan kepala desa dan pendaftaran bakal calon kepala desa”.²⁶

Informasi mengenai adanya pendaftaran calon kepala desa juga dituturkan oleh “N” selaku masyarakat desa Pladen.

“Saya mendapatkan informasi tentang pilkades itu nggeh sangking tetangga-tetangga menawi tanggi-tanggi (tetangga) ngertos (mengerti) informasi sangking RT nopo RW terus enten banner di balai desa juga , dan niku kan rame-ramene pemilu serentak mbak.”²⁷

Hal tersebut juga diperkuat oleh “AF” selaku masyarakat desa Pladen.

“Saya mendapati informasi juga dari para tetangga mengenai informasi pencalonan kepala desa, karena jarangnya saya kumpul kaleh RT nggih karena waktunya telas di tempat kerja mboten (tidak) seperti dulu yang aktif di organisasi desa. Tapi niku soal sinten mawon ingkang ajeng nyalon mpon dungu-dungu mbak kalau ajeng

²⁶ “R” selaku Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Pladen di Kantor Pemerintahan Desa Pladen, pada 04 januari 2024, jam 09.45-11.02 WIB, Traskip 2.

²⁷ “N” selaku masyarakat Desa Pladen, di rumah responden pada 02 Februari 2024, jam 20.03-20.44 WIB, Traskip 4.

(mengenai siapa yang akan mencalonkan diri itu sudah ada desas desusnya) ada tiga kandidat gitu.”²⁸

Setelah adanya sosialisasi dan juga informasi mengenai pendaftaran calon kepala desa, tahapan selanjutnya yaitu menyeleksi serta pengumpulan berkas-berkas para calon kepala desa sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku yang berakhir pada 21 Oktober 2019. Setelah persyaratan calon kepala desa sudah sesuai dan telah memenuhi administrasi, maka para pendaftar bakal calon kepala desa dinyatakan sebagai calon kepala desa dan mereka harus menyampaikan visi dan misi serta melakukan pengundian nomor urut peserta calon kepala desa pladen pada 01 November 2019 yang diadakan di aula balai desa Pladen. Hal tersebut sesuai pernyataan dari “R” panitia pemilihan kepala desa pladen, yang mengatakan bahwa.

“setelah adanya undian nomor urut yang dilakukan pada 01 November 2019, para calon kepala desa Pladen mengadakan kampanye sesuai aturan yang telah disepakati para calon. Dan sekitar tanggal 6 November gitu mbak mendapatkan perintah dari kabupaten untuk pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).”²⁹

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat “AF” selaku masyarakat desa Pladen bahwasannya.

“setelah pengambilan nomor urut para calon juga memasang banner yang menyuarakan untuk mendukungnya yang berada di sudut jalan desa Pladen.”³⁰

Berikut adalah nama-nama peserta calon kepala desa Pladen sesuai dengan nomor undian.

²⁸ “AF” selaku masyarakat Desa Pladen, di rumah responden pada 02 Februari 2024, jam 19.10-19.53 WIB, Traskip 3.

²⁹ “R” selaku Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Pladen dan juga staff pemerintahan desa, di Kantor Pemerintahan Desa Pladen, pada 04 Januari 2024, jam 09.45-11.02 WIB, Traskip 2.

³⁰ “AF” selaku masyarakat Desa Pladen, di rumah responden pada 02 Februari 2024, jam 19.10-19.53 WIB, Traskip 3.

Tabel 4. 7 Nama-Nama Calon Kepala Desa Pladen

No.	Nama Calon Kepala Desa
	H.Maslikan
	Choiruddin
	Ely Widyastuti

Sumber: Diperoleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa

Kesetaraan gender merupakan konsep daripada kultural yang membedakan antara peran, moralitas, karakteristik, perilaku, maupun emosional di antara laki-laki dengan perempuan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.³¹ Gender dijadikan sebagai pandangan maupun keyakinan yang ada dalam masyarakat mengenai bagaimana seharusnya laki-laki maupun perempuan bertingkah laku dan juga berpikir. Gender dapat membedakan fungsi di antara laki-laki dengan perempuan dalam segi biologis maupun kodratnya akan tetapi terkadang masyarakat memandang sebelah mata mengenai kesetaraan gender dan membebankan sebuah pekerjaan domestik kepada salah satu dari gender. Menjadikan gender seolah-olah menjadi budaya yang dapat ditawarkan, padahal dalam kenegaraan kesetaraan gender sudah dikuatkan oleh hukum, politik, ekonomi, maupun nilai-nilai ideologi serta sebagainya. Yang mana perempuan maupun laki-laki mempunyai kedudukan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.³²

Dari sejarah mengenai peradaban manusia, kedudukan mengenai perempuan merupakan sebuah potret yang unik sekaligus bersifat kontroversial. Sebelum adanya emansipasi

³¹ T Heraty, *Transendensi Feminin: Kesetaraan Gender Menurut Simone de Beauvoir* (Gramedia Pustaka Utama, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=Y128DwAAQBAJ>.

³² A E Z Musa et al., *Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi* (Nas Media Pustaka, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=WbvFEAAAQBAJ>.

wanita perempuan tidak dibiarkan untuk mengenyam pendidikan bahkan hak sosialnya direnggut oleh masyarakat di lingkungannya sendiri. Sejak masa reformasi sebuah pemerintahan yang baru dipilih berdasarkan hasil pemilu mengharapkan terwujudnya demokrasi yang menginginkan hak-hak dari rakyatnya terpenuhi serta mendapatkan kebebasan tanpa membedakan suatu gender, bahasa maupun ras.

Mewujudkan demokrasi yang mengedepankan hak-hak bagi semua masyarakat merupakan mimpi semua kalangan dan merupakan upaya yang harus terus diperjuangkan. Adanya permasalahan mengenai partisipasi wanita di bidang politik merupakan hal yang harus dipecahkan karena partisipasi politik wanita merupakan bagian dari hak asasi dan menjadi persyaratan wajib untuk mewujudkan demokrasi di negara Indonesia untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang transparan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sejatinya demokrasi mempunyai makna untuk memperjuangkan sebuah kepentingan bagi semua penduduk Indonesia terutama bagi wanita, memperbaiki kehidupan mereka dan melepaskan mereka dari penindasan, keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Ibu Ely selaku kepala desa perempuan di desa pladen.

“Kalau dikatakan layak nggeh layak apalagi banyak perempuan sekarang ini bekerja beda nggeh a karo zaman kae. Zaman sakniki (sekarang) modele emansipasi wanita ada jaminan hukum untuk perempuan dalam bekerja dan ikut berpolitik. Jadi di bilang layak nggeh layak apalagi menjadi seorang pemimpin kalau memang mampu nggeh maju mawon. Karena zaman sakniki nggeh katah pemimpin-pemimpin hebat yang berasal dari wanita. Nggeh wonten (ya ada) wanita yang masih khawatir terus tidak percaya diri dengan kemampuannya sendiri padahal kita sebagai wanita juga bisa seperti laki-laki. Karena memimpin merupakan sebuah perkara yang bisa dilakukan serta dijalankan oleh semua kalangan dan tidak terkecuali wanita. Kalau banyak orang terutama orang-orang desa yang masih menganggap perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin bahkan berpendapat menyalahi kodrat itu hal yang salah, karena kodrat kita yang sebenarnya kan cuman mengandung, melahirkan, menyusui, menstruasi selain itu kan bisa dilakoni bareng nggeh a. Kanggene (buat) kulo (saya) ayo semua wanita

terus mengembangkan diri kita agar dapat mewujudkan sebuah negara yang demokratis, transparan dan menjunjung hak asasi manusia karena dalam negara ini terdapat hukum yang mengatur hak-hak kita.”³³

“R” selaku staf pemerintahan pladen juga berpendapat bahwa

“Agama kita tidak melarang, tapi kalau pemimpin sholat seperti di masjid nopo mushola-mushola itukan harus laki-laki tapi kalau pemimpin masyarakat kecuali rumah tangga nggeh angsal perempuan. Kalau terdapat perempuan lueh apik layak kagem memimpin nggeh mboten nopo-nopo (kalua ada pemimpin yang baik dan berkualitas itu tidak apa-apa). Masio (meskipun) ada perbedaan diantara pemimpinan perempuan dengan laki-laki. Kalau pemimpin laki-laki niku (itu) lebih tegas dan kalau bertindak lebih seringnya menggunakan akal rasionalnya dan mengesapingkan rasa tidak teganya. Namun kalau pemimpinan perempuan ikukan kados ibu nggeh mbak lebih untuk mengayomi dan juga menimbangan masukan dari lainnya, pemimpin perempuan tidak grusagrusu dalam mengambil keputusan dan lebih untuk menerima masukan dari siapapun. Kados (seperti) Ibu Ely itu seringnya nggeh menerima masukane siapapun.”³⁴

Hal tersebut juga dituturkan oleh “AF” selaku masyarakat desa Pladen yang berpendapat bahwa:

“setahu saya menurut islam imam niku tidak boleh perempuan harus laki-laki. Karena yang diimami itukan semua genderkan, bisa laki-laki bisa perempuan. Gender yang beraneka ragam itu tidak boleh dipimpin seorang imam perempuan, harusnya seperti itu mbak. Tapi karena kita sudah terbiasa secara nasional juga ada emansipasi perempuan Yaitu wanita boleh, boleh pinter, boleh bekerja, boleh menjadi pemimpin ya kita ikut saja. Karena itu sudah diatur dalam undang-undang. Dan bagaimanapun itu sudah

³³ Ely Widyastuti selaku Kepala Desa Pladen di Desa Pladen, pada 04 januari 2024, jam 08.10-09.30 WIB, Traskip 1.

³⁴ R” selaku Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Pladen dan juga staff pemerintahan desa, di Kantor Pemerintahan Desa Pladen, pada 04 januari 2024, jam 09.45-11.02 WIB, Traskip 2.

di godok lah banyak pemimpin, banyak orang pintar, banyak ulama juga jadi kalau sudah disetujui ya berarti diperbolehkan. Itu menurut saya mengenai kepemimpinan perempuan. Jadi mau tidak mau ya harus setuju. Kita inikan masyarakat ya mbak jadi manut pada undang-undang. Toh kenyataannya ada banyak perempuan yang menjadi pemimpin atau kepala desa, atau presiden, atau gubernur, atau apalah. Kenyataannya kan sudah terjadi, artinya sebagai warga negara yang baik ikut menghargai mereka dan tidak mendiskriminasi.”³⁵

Dalam wawancara dengan responden atas nama “N” juga berpendapat bahwa

“memimpin itu bisa dilakukan siapapun nggih mbak. Kadang agama dados latar belakang perempuan itu tidak maju jadi pemimpin. Tapi banyak juga ulama yang membolehkan kok. Terus banyak juga di zaman sekarang ini ada pemimpin-pemimpin perempuan yang bagus-bagus, hebat-hebat. Jadi nggeh layak dan kenapa tidak ngoten (gitu). Selagi mampu nggeh (ya) maju aja. Sekarang zamannya emansipasi perempuan jadi sah-sah saja seorang perempuan maju untuk menjadi kepala desa atau pemimpin.”³⁶

Adanya partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan bagian dari mewujudkan adanya pemerintahan yang demokratis. Dalam masyarakat yang masih menganut patriarki membuat para perempuan berpikir bahwa seorang pemimpin harus dari kalangan laki-laki sehingga perempuan hanya sebatas pendukung saja padahal perempuan mempunyai hak yang sama dalam sektor publik. Pemilihan kepala desa di Kabupaten Kudus pada tahun 2019 mempunyai permasalahan yang dinilai sama dengan pemilihan kepala desa pada tahun sebelumnya.

Kurangnya partisipasi politik perempuan merupakan salah satu dari permasalahan Pilkades yang sering terjadi. Adanya

³⁵ AF” selaku masyarakat Desa Pladen, di rumah responden pada 02 Februari 2024, jam 19.10-19.53 WIB, Traskip 3.

³⁶ “N” selaku masyarakat Desa Pladen, di rumah responden pada 02 Februari 2024, jam 20.03-20.44 WIB, Traskip 4.

stereotip gender membuat masyarakat beranggapan bahwa sosok perempuan tidak layak menjadi seorang pemimpin. Pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Kudus pada tahun 2019 yang diikuti oleh 115 desa hanya terdapat 8 perempuan yang berhasil menjadi seorang kepala desa.

Salah satu dari 8 perempuan tersebut yaitu Ibu Ely yang menjadi kepala desa di Desa Pladen. Masyarakat desa Pladen yang menjunjung akan kesetaraan gender menganggap bahwa perempuan juga bagian dari warga negara yang dilindungi haknya untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam pemilihan kepala desa tahun 2019 merupakan tahun pertama seorang perempuan yang menjabat sebagai kepala desa di Desa Pladen dengan jumlah perolehan suara 2.457.³⁷

Tabel 4. 8 Rekapitulasi Hasil Pilkades Desa Pladen

No.	Nama Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Maslikan	1.529
2.	Choirudin	11
3.	Ely Wiadiastuti	2.457
	Tidak Sah	35

Sumber: Data diolah peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa Pladen

Dalam perolehan suara tersebut menjadikan sebuah bukti bahwa dalam masyarakat Desa Pladen yang juga masih terdapat budaya patriarki masih dapat menerima adanya kesetaraan gender. Hal tersebutlah sesuai pernyataan yang disampaikan oleh “R” yang sekarang sebagai staf pelayanan di pemerintahan Desa Pladen.

“Kalau menurut pendapat saya mengenai kepemimpinan perempuan apalagi sebagai kepala desa itu saya setuju. Dalam agama kita juga tidak melarang perempuan untuk meraih cita-citanya dan bekerja di ranah publik. Apalagi di zaman sekarang banyak pemimpin perempuan. Dan untuk partisipasi perempuan yang

³⁷ Isnaeni Selaku Staf Pemerintahan Desa Pladen, pada 12 Januari 2024, jam 10.01-10.32

mencalonkan diri sebagai calon kepala desa itu tidak ada batasan asalkan memenuhi syarat apalagi partisipasi perempuan juga sudah terdapat dalam undang-undang yang membahas hal tersebut. Pemimpin perempuan di desa Pladen ini baru pertama kalinya, namun hal tersebut bisa diterima oleh masyarakat setempat. Terlebih lagi masyarakat juga tidak mendiskriminasi hal tersebut bahkan mendapatkan sambutan yang positif bisa dilihat dari perolehan suara yang tinggi”.³⁸

Menurut “AF” sebagai warga Desa Pladen juga mengatakan bahwa di desa pladen kepemimpinan perempuan ini merupakan pertama kalinya.

“sebelumnya pernah ada yang nyalon maksudnya tapi tidak jadi. Dulu almarhum ibu sumilah pernah nyalon mbak tapi tidak jadi selebihnya tidak ada. Jadi baru ada dua perempuan di desa Pladen yang pernah mencalonkan diri. Nah baru kali ini Pladen kepala desanya perempuan yaitu Bu Ely.”³⁹

Pendapat tersebut juga diperjelas oleh ibu “N” yang juga merupakan warga desa pladen.

“ iya benar mbak, ini pertama kali desa pladen kepala desanya perempuan. Belum ada sebelumnya kepala desa pladen itu perempuan. Tapi kalau pernah nyalon ada tapi kayae (sempat) dulu tidak jadi.”⁴⁰

Jarangnya bahkan baru kali ini adanya kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Pladen. Dalam kepemimpinan seorang perempuan karakteristik personal merupakan bagian yang penting. Misalnya integritas yang dapat membantu para pemimpin perempuan untuk membangun sebuah kepercayaan dengan masyarakat, karyawan maupun teman kerja serta dapat mempertahankan kesan yang baik. Hal tersebut juga yang diberikan oleh Ibu Ely untuk menciptakan suasana kerja yang baik di antara para staf.

³⁸ “R” selaku Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Pladen dan juga staff pemerintahan desa, di Kantor Pemerintahan Desa Pladen, pada 04 januari 2024, jam 09.45-11.02 WIB, Transkrip 2.

³⁹ “AF” selaku masyarakat Desa Pladen, di rumah responden pada 02 Februari 2024, jam 19.10-19.53 WIB, Transkrip 3.

⁴⁰ “N” selaku masyarakat Desa Pladen, di rumah responden pada 02 Februari 2024, jam 20.03-20.44 WIB, Transkrip 4.

"Dalam kepemimpinan saya, saya tidak pernah membeda-bedakan para staf terutama staf perempuan. Mereka bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksinya masing-masing."⁴¹

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh bapak "R" sebagai staf pelayanan di pemerintah desa Pladen.

" Kalau soal staf perempuan dengan staf laki-laki dalam bekerja tidak ada pembedanya, semua bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Dalam kegiatan sehari-hari juga begitu semua merata tidak ada yang dibedakan."⁴²

Dalam kepemimpinannya Ibu Ely berusaha untuk mengadakan upaya-upaya untuk meningkatkan representasi perempuan dalam pemerintahannya misal terdapat pengangkatan staf perempuan. Yaitu pada posisi kepala urusan tata usaha dan umum, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pemerintahan. Para staff tersebut awalnya merupakan staf biasa namun pada pertengahan 2023 para staf perempuan tersebut diangkat menjadi kepala bagian karena purnanya kepala bagian terdahulu. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak "R" sebagai staf.

" ada mbak, jadi awalnya staf perempuan tersebut menjadi staf biasa, namun dengan adanya kepala bagian yang purna mereka diangkat menjadi kepala bagian guna mengisi kekosongan jabatan tersebut. Setelah itu pada bulan agustus tahun 2023 terdapat seleksi perangkat desa namun terdapat kesalahan yang tidak terduga sehingga gagal, jadi masih terdapat beberapa bagian yang masih kosong untuk saat ini."⁴³

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ibu Ely mengenai pengangkatan staf perempuan yang ada di pemerintahan desa Pladen.

⁴¹ Ely Widyastuti selaku Kepala Desa Pladen di Desa Pladen, pada 04 januari 2024, jam 08.10-09.30 WIB, Transkip 1.

⁴² "R" selaku Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Pladen dan juga staff pemerintahan desa, di Kantor Pemerintahan Desa Pladen, pada 04 januari 2024, jam 09.45-11.02 WIB, Transkip 2.

⁴³ "R" selaku Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Pladen di Kantor Pemerintahan Desa Pladen, pada 04 januari 2024, jam 09.45-11.02 WIB, Transkip 2.

“ya, kemaren ada mbak. jadi pada masa jabatan saya ini jadi kepala desa, ada 3 staf perempuan mbak. Awale (awalnya) staf biasa tapi karena para staf kepala seksi itu puna nggeh otomatis digantikan dulu untuk mengisi jabatan tersebut.”⁴⁴

Kepemimpinan merupakan usaha untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditentukan. Dalam mempengaruhi orang lain, seorang pemimpin harus mempunyai gaya untuk meraih tujuan tersebut serta untuk mempengaruhi staf maupun masyarakat. Gaya kepemimpinan dalam memerintah dinilai penting karena dapat mempengaruhi sebuah program kerja dan bagaimana untuk menjalankan program tersebut agar dapat meraih keberhasilan untuk kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah program-program kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam kepemimpinan Ibu Ely selaku kepala desa pladen.

Tabel 4. 9 Program Kegiatan Desa Pladen

No.	Program Kegiatan	Dasar Hukum Kegiatan
1.	<p>Program pembangunan desa.</p> <p>a) Pembangunan, pemanfaatan serta memelihara infrastruktur dan lingkungan desa. meliputi pembangunan jalan pemukiman, jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian, jalam pemukiman masyarakat desa.</p> <p>b) Pembangunan, pemanfaatan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan. Meliputi peningkatan sarana dan prasarana posyandu, adanya</p>	<p>a) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengenai desa. yang mengatur berbagai aspek tentang pengelolaan maupun pembangunan desa.</p> <p>b) peraturan Menteri Kesehatan nomor 71 tahun 2013 mengatur mengenai pembangunan serta pengelolaan prasarana Kesehatan di tingkat desa.</p> <p>c) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 72 dan 73. Yaitu dengan memberikan landasan hukum untuk</p>

⁴⁴ Ely Widyastuti selaku Kepala Desa Pladen di Desa Pladen, pada 04 januari 2024, jam 08.10-09.30 WIB, Transkrip 1.

	<p>polindes, sanitasi lingkungan.</p> <p>c) pembangunan usaha ekonomi produktif dan pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi. Meliputi pengembangan BUMDes, pemeliharaan permodalan BUMDes</p> <p>d) pelestarian lingkungan hidup. Meliputi pembersihan aliran sungai.</p>	<p>pembentukan, tugas, wewenang, serta pengelolaan BUMDes.</p> <p>d) Undang-undang nomor 32 tahun 2009.</p>
<p>2.</p>	<p>Program pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan, meliputi:</p> <p>a) pembinaan Lembaga kemasyarakatan</p> <p>b) mengembangkan gotong royong antar masyarakat desa.</p>	<p>a) UU No. 6 tahun 2014 (mengenai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat)</p> <p>b) Perda Kabupaten Kudus No 9 tahun 2000 (gotong royong merupakan bentuk kerjasama yang spontan serta tumbuh melembaga mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar masyarakat desa dan dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara materi maupun spiritual.</p>

Seorang pemimpin mempunyai fungsi maupun peran yang sangat signifikan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Salah satu fungsi atau peran tersebut yaitu mengambil sebuah keputusan. Proses dari pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin harus memastikan keputusan tersebut selaras dengan nilai-nilai maupun cita-cita dari organisasi. Berkenaan mengenai pengambilan keputusan di desa pladen yaitu terdapat aspirasi maupun usulan yang diberikan masyarakat untuk pembangunan maupun kemajuan desa. Aspirasi maupun usulan tersebut bisa disampaikan melalui RT/RW, perangkat desa, dan lain sebagainya. Semua aspirasi maupun usulan-usulan yang diberikan masyarakat selanjutnya ditampung dan diurutkan sesuai prioritas yang dapat mensejahterakan masyarakat desa pladen. Dari seluruh usulan tersebut nantinya akan dibahas melalui rapat musdes maupun musrenbangdes yang dihadiri oleh masyarakat maupun perwakilannya, BPD, RT/RW, perangkat desa, serta perwakilan dari kecamatan. Hal tersebut sesuai pernyataan dari Ibu Ely selaku kepala desa.

“Dalam kepemimpinan saya setiap pengambilan keputusan saya selalu melibatkan masyarakat, perangkat desa, BPD, para pemuda yang biasanya dilakukan oleh karang taruna dan juga perwakilan dari kecamatan. Keputusan yang saya ambil itu tergantung usulan terbanyak dan yang di rembuk bersama-sama. Usulan-usulan dari warga yang biasanya saya dapatkan itu dari para warga yang berbicara langsung dengan saya atau juga yang disampaikan oleh RT/RW. Yang mana nantinya usulan-usulan yang paling dibutuhkan itu yang nantinya akan dijalankan terlebih dahulu. Untuk pengambilan keputusan itu melalui musyawarah biasanya melalui musrenbangdes dan musdes. Jadi pada waktu musdes ataupun musrenbangdes masyarakat harus aktif dan harus berbicara semua secara bergantian. Yang mana nantinya mendapatkan sebuah keputusan yang disepakati oleh banyak orang.”⁴⁵

Pernyataan informan tersebut juga diperkuat oleh “R”selaku staf di pemerintahan desa pladen.

“Jadi setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ibu Ely selaku kepala desa itu selalu melibatkan

⁴⁵ Ely Widyastuti selaku Kepala Desa Pladen di Desa Pladen, pada 04 Januari 2024, jam 08.10-09.30 WIB, Transkrip 1.

masyarakat, BPD, para perangkat desa dan juga perwakilan dari kecamatan. Dalam pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan musyawarah biasanya musdes atau musrenbang Des. Bukan hanya itu saja semisal ada permasalahan atau akan ada acara desa itu juga melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan para masyarakat atau yang mewakili. Dalam musdes dan musrenbangdes itu masyarakat diwajibkan untuk mengutarakan pendapatnya masing-masing yang mana nantinya pendapat maupun usulan-usulan tersebut ditampung dan juga dipilih mana yang lebih prioritas itu yang dijalankan terlebih dahulu. Jadi pembangunan maupun keputusan lainnya itu semuanya melibatkan masyarakat.”⁴⁶

Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh “AF” dan Juga “N” selaku masyarakat desa pladen.

“kalau pemerintahan Ibu Ely itu lebih banyak musyawarah dan juga melibatkan pemuda. Kalau pemerintahan yang dulu itu mbak organisasi kepemudaan kan tidak ramai tapi kalau bu Ely inikan organisasi kepemudaan lebih aktif dan ibu Ely ini kayak memberikan respon baik gitu kalau pemuda-pemuda mengadakan acara misalnya itu ibu Ely mendatangi. Entah ada di dukuh jawik atau dukuh pladen bu ely tidak membeda-bedakan, didatangi semua gitu. Dan itu tadi kalau ada acara pasti dimusyawarahkan dengan beliau si mbak.”⁴⁷

“iya, beliau tuh sering mengadakan musyawarah sih mbak setiap pengambilan keputusan. Kayak kemarin waktu ada haulnya mbah Nata Kusuma Aji itu ada acara untuk memperingatinya itu Bu Ely bersama dengan pemuda desa itu musyawarah untuk membahas acara niku. Dan biasanya ada kepala desa kalau musyawarah cuman kayak pas ada kepentingan untuk membahas desa gitukan tapi Bu Ely ini

⁴⁶ “R” selaku Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Pladen dan Staff Pemerintahan di Kantor Pemerintahan Desa Pladen, pada 04 januari 2024, jam 09.45-11.02 WIB, Transkrip 2.

⁴⁷ “AF” selaku masyarakat Desa Pladen, di rumah responden pada 02 Februari 2024, jam 19.10-19.53 WIB, Transkrip 3.

semua dimusyawarahkan dulu dan pemuda itu dilibatkan untuk ikut membantu gitu.”⁴⁸

Gambar 4. 2 Musdes



Sumber: Media sosial Instagram pemerintah Desa Pladen



⁴⁸ “N” selaku masyarakat Desa Pladen, di rumah responden pada 02 Februari 2024, jam 20.03-20.44 WIB, Transkrip 4

Gambar 4. 3 Musrenbangdes



Sumber: Media sosial Instagram pemerintah Desa Pladen

Selain musdes atau musrenbangdes, salah satu musyawarah pemerintah Pladen juga mengadakan semacam musyawarah rembuk stunting yang dilakukan pada 29 agustus 2022. Dimana dalam musyawarah rembuk stunting itu melibatkan ibu PKK, bidan desa dan juga tenaga medis dari Puskesmas Jekulo. Yang mana musyawarah rembuk stunting itu membahas mengenai penanganan stunting untuk anak-anak yang terkena stunting di Desa Pladen.

Gambar 4. 4 Rembuk Stunting



Sumber: Media sosial Instagram pemerintah Desa Pladen

Gambar 4. 5 Rapat pembentukan Panitia Haul Mbah Makdum Noto Kusumo



Sumber: Media sosial Instagram pemerintah Desa Pladen

Selain seringnya musyawarah dengan para warga di setiap pengambilan keputusannya, Ibu Ely dalam memulihkan perekonomian masyarakat desa pasca covid-19 juga bagus. Beliau seringkali membuat bazar UMKM, dimana para pedagang yang berjualan di bazar tersebut adalah mengutamakan para pedagang khusus dari warga masyarakat Desa Pladen. Dan juga melakukan perintah dari kecamatan seperti mengadakan expo desa yang dilakukan di lapangan desa pladen. Dalam bazar dan juga expo tidak semata-mata hanya ada penjual UMKM tetapi juga ada wahana permainan anak-anak untuk menarik minat para pengunjung.

“ nak kemaren wektu covid kan semua UMKM itukan mandek mbak, lhah expo iku didadekake (dijadikan) upaya pak camat kanggo (untuk) mebantu UMKM. Karena wayah (pada waktu) covid kan jarang jualan sehingga tidak ada pemasukan. Jadi salah satu dari kabupaten itu mengadakan expo desa. Kemaren semua desa itu ada tapi waktunya yang beda-beda, ada jadwalnya. Itu melibatkan karangtaruna juga mbak untuk parkir dan lainnya. Itu lumayan mbak responnya masyarakat baik mengenai expo desa, dan untuk penyewaan lahannya itu murah untuk warga asli desa itu 20.000 per malam kalau orang luar itu 30.000 kalau desa lainnya ada kok yang 150.000 tiga hari jadi permalamnya itu 50.000.

Para pedagang juga berpeseran kepada saya menginginkan pembuatan expo dan juga pasar malam lagi mbak.”⁴⁹

Pernyataan tersebut sesuai dengan bapak “AF” dan ibu “N” selaku masyarakat desa dan juga dibenarkan oleh bapak “R” selaku staf pemerintahan Desa Pladen.

“kalau dilihat meningkatkan perekonomian langsung kaya kan tidak, tapi usaha-usahanya itu ada untuk membantu perekonomian UMKM. Apalagi waktu covid ya itu tidak ada pemasukan dari UMKM. Nah itu Ibu Ely sering mengadakan bazar, pasar malam dan juga kemaren yang terbaru itu ada expo desa mbak yang juga dari kecamatan. Jadi pada expo itu kan ada pagelaran seni ketoprak nah itu diselingi dengan expo yang berjalan sekitar tiga hari kayae (sepertinya) mbak. Itu merupakan bukti bahwa dalam pemerintahan Ibu Ely itu sudah memban lah untuk memulihkan UMKM yang ada di desa pladen.”⁵⁰

“ Kemarin sebelum expo itu ada pasar malam mbak, sering itu dan aku dengar-dengar waktu pasar malam itu pedagang tidak dikenai biaya sih kayae. Tapi yang expo ini baru tahun ini, tahun sebelumnya belum. Kalau menurut saya itu membantu sih mbak untuk pemulihan perekonomian UMKM. Terlebih waktu covid itu biasanya UMKM itu ada yang jualan loh di pinggir lapangan desa. tapi waktu covid itu sepi dan jarangkan orang pergi apalagi orang-orang itu tidak keluar rumah nak ga penting-penting banget.”⁵¹

“ iya betul mbak, jadi kemarin sebelum expo itu ada seperti pasar malam yang di dalamnya da pedagang UMKM dan juga wahana anak-anak. Terus waktu expo desa nggih enten dan didalamnya juga sama ada para pedagang UMKM dan wahana. Kalau expo itu perintah dari kecamatan mbak dan memang seluruh desa itu harus ada tapi waktunya yang berbeda, dan pada waktu itu dibarengi dengan jalan santai

⁴⁹ Ely Widyastuti selaku Kepala Desa Pladen di Desa Pladen, pada 04 januari 2024, jam 08.10-09.30

⁵⁰ “AF” selaku masyarakat Desa Pladen, di rumah responden pada 02 Februari 2024, jam 19.10-19.53

⁵¹ “N” selaku masyarakat Desa Pladen, di rumah responden pada 02 Februari 2024, jam 20.03-20.44 WIB, Transkrip 4

itu pagi waktu dan terakhir itu hari terakhirnya ada seni ketoprak juga.”⁵²

Bukan hanya itu saja Ibu Ely juga cekatan dalam mengatasi permasalahan yang ada di desa. Seperti beliau sering membantu masyarakat Desa Pladen yang berada di dukuh jawik yang sering terkena banjir karna tanggul sungai yang sering jebol. Beliau tidak pernah takut, dan terus berusaha sebaik mungkin untuk memberikan masyarakatnya terjamin kemakmurannya.

“jadi mbak kalau tantangan itu desa pladen sering banjir nggih itu tantangan terbesar apalagi di Dukuh Jawik yang sering jebol tanggulnya. Semua usaha sebenere mpon tak kerahkan dari yang mengeruk sungai, pembersihan sungai dari sampah terus pembuatan tanggul itu juga sudah pernah mbak tapi kadang kalau debit air itukan tidak bisa kita prediksi kadang malam-malam jebol. Jadi yang biasa saya lakukan terlebih dulu ya membantu warga mbak yang kebanjiran, terus jalan-jalan yang berlumpur dan membantu pembuatan tanggul sementara dengan pasir atau padas itu ditaruh di sak atau karung gitu dibuat tanggul untuk sementara. Pokoknya itu sering mbak kalau banjir itu tantangan yang lumayan berat. Pokoknya kalau musim hujan itu siap-siap mbak.”⁵³

Hal tersebut sesuai dengan yang dituturkan oleh “AF” selaku warga dukuh jawik.

“Kalau yang sudah dilakukan ibu ely itu pembuatan tanggul-tanggul di sepanjang sungai Dukuh Jawik dan perbatasan dengan Desa Sidomulyo mbak. Itu yang dulunya rawan abrol, itu sudah dikerjakan dan pada saat terjadi banjir dulu itu Bu Ely malam-malam gabung sama BPD ikut pakek celana dan sepatu but saya lihat sendiri dia ikut macul-macul. Pokoke ikutlah membantu jadi itu jarang terjadi pada pemimpin perempuan, karena biarpun juga perempuan itukan kadang takut ya dengan banjir. Cuman Bu Ely itu memang cekatan untuk mengatasi penanggulangan banjir mbak. Terus dia rajin, istilahnya koordinasi dengan pemuda-

⁵² “R” selaku Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Pladen dan Staf Pemerintahan di Kantor Pemerintahan Desa Pladen, pada 04 januari 2024, jam 09.45-11.02 WIB, Transkrip 2

⁵³ Ely Widyastuti selaku Kepala Desa Pladen di Desa Pladen, pada 04 januari 2024, jam 08.10-09.30 WIB, Transkrip 1

pemuda terutama kalau musim hujan itu pemantauannya itu sering banget mbak. Kalau pemimpin laki-laki kan sudah biasa ya mbak.”⁵⁴

Hal tersebut juga disampaikan oleh “R” selaku staf pemerintahan desa Pladen. Dan juga ibu “N” selaku masyarakat dukuh pladen.

“ Bu Ely itu dalam penanggulangan banjir cepat sekali mbak. Meskipun perempuan tapi beliau itu ikut nimbrung gitu membantu warga, ikut membuat tanggul sementara juga, ikut membersihkan lumpur di jalan juga. Dan apaya beliau itu tidak mudah menyerah, padahal kalau musim hujan beliau itu selalu siap siaga kadang sungai di dukuh jawik itu kalau musim hujan selalu di cek dibersihkan gitu biar tidak membuat tanggul jebol lagi. Terus Bu Ely juga sering malam-malam cuman sekedar ngecek sungai kalau hujan airnya sudah sampai mana gitu. Tapi untuk tahun ini alhamdulillah sudah tidak banjir mbak mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya juga.”⁵⁵

“Kalau saya itu tidak tahu secara betul mbak karena rumah saya itu kan di dukuh pladen krajan , tapi kalau warga dukuh jawik itu pernah cerita kalau penanganan Bu Ely itu sangat cekatan untuk masalah banjir. Dan itu juga terbukti kok, sekarang sudah tidak banjir karena Bu Ely sering memantau perkembangan mengenai permasalahan utama desa banjir dan memang dari dulu Dukuh Jawik itu menjadi langganan banjir dan tanggul juga sering jebol.”⁵⁶

⁵⁴ “AF” selaku masyarakat Desa Pladen, di rumah responden pada 02 Februari 2024, jam 19.10-19.53 WIB, Transkrip 3

⁵⁵ “R” selaku Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Pladen dan Staff Pemerintahan di Kantor Pemerintahan Desa Pladen, pada 04 januari 2024, jam 09.45-11.02 WIB, Transkrip 2

⁵⁶ N” selaku masyarakat Desa Pladen, di rumah responden pada 02 Februari 2024, jam 20.03-20.44 WIB, Transkrip 4

Gambar 4. 6 Gotong Royong Membersihkan Lumpur Akibat Tanggul Jebol



Sumber: Media Instagram Pemerintah Desa Pladen

Gambar 4. 7 CCTV Sepanjang Perempatan Desa Pladen



Sumber: Media sosial Instagram pemerintah Desa Pladen

Gambar 4. 8 Polsek Jekulo Bersama Dengan Pemerintah Desa Pladen Untuk Memberikan Semangat Anak-anak agar Giat Bersekolah



Sumber: Media Sosial Instagram Pemerintah Desa Pladen

Gambar 4. 9 Polsek Jekulo Bersama Dengan Pemerintah Desa Pladen Untuk Memberikan Sosialisasi Anti Bullying



Sumber : Media Sosial Instagram Pemerintah Desa Pladen

Gambar 4. 10 Pengambilan Sumpah dan Pelantikan pada Staf Baru yang Ada Di Desa Pladen



Sumber: Media Sosial Instagram Pemerintahan Desa Pladen

C. Pembahasan

1. Analisis Partisipasi Politik Perempuan dalam Pilkadaes di Kabupaten Kudus Tahun 2019

Agama Islam melihat gender merupakan bagian yang tidak dipisahkan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan yang mempunyai tanggung jawab serta perannya masing-masing untuk menjalankan proses kehidupan dari masing-masing individu untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada dalam politik, ekonomi maupun lainnya.

Agama Islam tidak melarang bagi kaum perempuan untuk terjun dalam politik dan mengembangkan bakatnya dalam ruang publik, asalkan perempuan tersebut tidak meninggalkan peran serta tanggung jawabnya dalam rumah tangga sebagai seorang istri untuk suaminya maupun ibu dari anak-anaknya. Karena pada zaman sekarang perempuan mempunyai kapabilitas sebagai seorang pemimpin yang juga dimiliki oleh laki-laki pada umumnya. Perempuan tidak selalu identik dengan perasaan emosional sehingga tidak mengedepankan sikap rasional akan tetapi perempuan juga mampu untuk berpikir secara rasional, dan membawakan sikap lemah lembutnya dalam pemerintah untuk mengayomi semua masyarakatnya.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari staf pemerintah Desa Pladen Bapak "R" bahwasannya agama tidak melarang kepemimpinan perempuan karena sejatinya semua manusia merupakan pemimpin di mukabumi. Dan apabila perempuan mempunyai kualitas dan kapabilitas dalam memimpin maka kepemimpinan perempuan tersebut diperbolehkan.

Alimatul Qibtiyah menerangkan bahwa pemahaman Islam mengenai kesetaraan gender itu terbagi dalam tiga bagian yaitu literalis, moderat dan progresif, yang mana pada golongan moderat dan progresif menganggap bahwa selama tidak bertentangan dengan agama Islam mutual partnership menghendaki adanya persamaan sepenuhnya antara perempuan dan juga laki-laki dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Golongan moderat dan progresif juga membenarkan bahwa kesetaraan hak perempuan dan laki-laki sangatlah penting. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam keadilan, sosial, pekerjaan dan juga pendidikan. Akan tetapi terdapat perbedaan mereka dalam cara mencapai kesetaraan dan juga kesediaan mereka dalam mengambil tindakan radikal atau progresif.

Sementara golongan literalis menganggap bahwa kesetaraan dan feminis dijadikan sebagai alat yang digunakan

perempuan untuk melepaskan diri dari laki-laki. Jadi pada dasarnya, kaum literalis berpendapat bahwa gender dan feminisme sama sekali tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Karena perempuan dan laki-laki diciptakan dengan kodratnya masing-masing. Feminisme dan gender akan membuat para perempuan muslim berani melawan suami, menelantarkan anak-anaknya dan melanggar ajaran Islam.⁵⁷ Golongan literalis ini seperti adanya pemahaman tradisional yang sampai sekarang masih ada di sebagian orang-orang yang berada di Kabupaten Kudus, dan dengan adanya pemahaman tradisional tersebut membuat kurangnya partisipasi politik perempuan di Kabupaten Kudus terutama sebagai seorang kepala desa perempuan.

Sementara Prof. Siti Musdah Mulia memandang kesetaraan gender sebagai kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Adanya kesamaan hak tersebut dapat menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang mempunyai martabat seutuhnya tanpa adanya penindasan dari pihak superioritas dari salah satu gender.⁵⁸

Berkaitan mengenai partisipasi perempuan dalam pilkades atau biasa disebut dengan pemilihan kepala desa yang merupakan salah satu dari demokrasi yang dilakukan secara langsung dalam tingkat desa. Dalam pemilihan kepala desa, seorang calon kepala desa dipilih langsung oleh masyarakatnya.⁵⁹ Dalam pemilu terutama pilkades masyarakat mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi. Laki-laki maupun perempuan mempunyai kesamaan hukum untuk mencalonkan diri sebagai kandidat calon kepala desa. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik terutamanya sebagai seorang kepala desa terus-menerus diwujudkan untuk meraih hak setiap orang mencapai keadilan dan persamaan. Dan salah satu untuk mewujudkan sebuah negara yang demokratis yaitu dengan keberpihakan serta afirmatif pada peningkatan keterwakilan dan juga partisipasi perempuan dalam politik.

Adanya kebijakan afirmatif yang memberikan kuota 30% untuk perempuan menunjukkan adanya pengendalian yang kuat

⁵⁷ Qibtiyah, "Alimatul Qibtiyah - Sensitivitas Gender Dan Asertivitas Berkomunikasi Dalam Berdakwah (2019), 127."

⁵⁸ Fajrussalam et al., "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Musdah Mulia (2023), 5511-5519."

⁵⁹ Syahrul Mustofa, *Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak "Sebuah Peradilan Baru Di Daerah"* (GUEPEDIA, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=J--IDwAAQBAJ>.

dari pemerintah pada perempuan dalam memberikan kesempatan untuk pembangunan politik.⁶⁰ Terdapat Undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang memberikan kesempatan kepada seluruh perempuan yang ada di Indonesia dapat maju karena terdapat hak-hak politiknya.⁶¹ Dengan adanya data diatas yang menunjukkan bahwa Ibu Ely unggul pada suara pilkades di Desa Pladen menandakan bahwa masyarakat desa Pladen mempunyai antusiasme memilih sosok perempuan untuk dijadikan sebagai pemimpinnya. Meskipun di masyarakat masih terdapat stigma yang negatif tentang kepemimpinan perempuan.

Pada tahun 2014 terdapat 12 kepala desa perempuan yang berhasil menjadi kepala desa di Kabupaten Kudus yang diikuti oleh 116 desa. Kepala desa perempuan tersebut meliputi desa Bacin, Garung Lor, Kaliwungu, Nganguk, Glantengan, Melati Lor, Gulng, Temulus, Sambung, Tanjungrejo, Piji dan juga desa Cranggang.⁶² Kepemimpinan perempuan juga dapat membuat masyarakat menjadi Makmur dan dinilai berhasil. Hal tersebut terbukti terdapat beberapa kepala desa perempuan yang kembali mencalonkan diri dan terpilih kembali pada pemilu 2019.

Terpilihnya kembali Kepala Desa pada pilkades membuktikan bahwa terdapat kepercayaan dari masyarakat bahwa kepala desa perempuan mempunyai dedikasi yang tinggi dan juga dinilai berhasil dalam kepemimpinannya sehingga program-program pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Akan tetapi pemilihan kepala desa di Kabupaten Kudus yang diikuti oleh 115 desa pada tahun 2019 hanya terdapat delapan perempuan yang berhasil lolos sebagai kepala desa. Dari presentasi tersebut dapat kita lihat bahwa dalam partisipasi perempuan untuk maju sebagai calon kepala desa yang ada di Kudus dinilai masih kurang dan mengalami penurunan dari pemilihan kepala desa sebelumnya.

⁶⁰ Umi Qodarsasi and Nevy Rusmarina Dewi, "Upaya Peningkatan Elektabilitas Calon Bupati Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018," *Muwazah* 11, no. 2 (2019): 225–44, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v11i2.2282>.

⁶¹ Sekretariat Negara, "Undang-Undang No. 7 Tahun 2017," 2020, 1–283, https://disdukcapil.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2020/01/UU_NO_7_2017.pdf.

⁶² Reporter Redaksi, "Inilah Daftar Kepala Desa Di Kabupaten Kudus Periode 2013," *BETANEWS*, 2014, <https://betanews.id/2014/06/inilah-daftar-kepala-desa-di-kabupaten.html>.

Negara Indonesia telah mengesahkan undang-undang mengenai ratifikasi konvensi hak politik perempuan yang tertuang dalam undang-undang nomor 68 tahun 1958.⁶³ Di mana undang-undang tersebut mengatur perwujudan serta kesamaan kedudukan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan untuk menempati posisi jabatan dalam birokrasi serta jaminan partisipasi pada organisasi sosial politik. Keterwakilan mulai tumbuh saat berlakunya perubahan undang-undang tahun 1945 yaitu pada pasal 28 h ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak mendapatkan kemudahan serta perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."⁶⁴

Adanya undang-undang tersebut menjadi sebuah landasan untuk semua warga negara Indonesia agar terhindar dan bebas dari adanya diskriminasi sistematis maupun struktural di berbagai aspek kehidupan termasuk pada aspek politik. Undang-undang tersebut sebagai akomodasi pada norma-norma hukum yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan keterwakilan dan partisipasi perempuan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Ely Widiastuti bahwa partisipasi seorang perempuan sudah dijamin pada undang-undang yang mengatur sehingga perempuan juga mempunyai hak untuk ikut berkontestasi menjadi seorang pemimpin. Akan tetapi masih terdapat hambatan bagi seorang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin⁶⁵

Kurangnya partisipasi perempuan untuk mencalonkan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin di Kabupaten Kudus dalam pemilihan kepala desa dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya pada norma dan budaya yang mengatur adanya peran tradisional perempuan di masyarakat yang dapat menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam politik utamanya menjadi seorang pemimpin. Karena adanya pandangan yang menyebar di masyarakat bahwa politik dan

⁶³ J Junaidi et al., *Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=uLTSEAAAQBAJ>.

⁶⁴ Pocut Eliza, "Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum Mengenai Pemenuhan Hak Kesehatan," *Kementerian Hukum Dan Ham*, no. PHN-02.HN.01.01 (2017): 1-223, https://bphn.go.id/data/documents/ae_pemenuhan_hak_kesehatan.pdf.

⁶⁵ Ely Widyastuti selaku Kepala Desa Pladen di Desa Pladen, pada 04 Januari 2024, jam 08.10-09.30 WIB, Traskip 1

kepemimpinan tidak cocok bagi perempuan dan hanya identik dengan maskulinitas.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan “AF” dan juga “R” warga Desa Pladen, bahwasannya kurangnya partisipasi perempuan untuk menjabat sebagai pemimpin atau seorang kepala desa diakibatkan karena adanya diskriminasi, marginalisasi, *stereotype* dan juga beban ganda. Dimana perempuan dibatasi bahkan dianggap tidak layak menjadi seorang pemimpin.⁶⁶ Adanya stereotip gender membuat adanya persepsi yang kurang baik pada kepemimpinan perempuan. Pemimpin perempuan harus membuktikan dirinya secara ekstra bahwa mereka berhak dan cocok untuk mendapatkan kepercayaan dari bawahan dan juga dari masyarakat.⁶⁷

Pendapat bahwa laki-laki mempunyai superioritas didasarkan pada anggapan bahwa laki-laki memiliki kemampuan, kekayaan untuk menghidupi istrinya dalam bentuk penanggungan hidup sehari-hari dan juga dalam bentuk maskawin. Amina Wadud Muhsin menjelaskan bahwasanya laki-laki sebagai *qowwam* atas perempuan tidak diartikan sebagai superioritas untuk semua laki-laki. Karena hal tersebut diperuntukkan secara fungsional saja selama laki-laki tersebut memiliki kriteria di dalam Al-Qur'an yaitu mempunyai kelebihan serta memberikan nafkah.

Fakhrudin ar-Razi, pemikir besar Sunni menjelaskan bahwa superioritas laki-laki atas perempuan dengan sejumlah alasan yaitu ilmu pengetahuan (al-alim) dan kemampuan (al-qudrah). Fachrudin mengatakan bahwa akal dan pengetahuan laki-laki lebih luas serta mempunyai kemampuan untuk melakukan kerja keras yang lebih prima daripada perempuan karena itu semua merupakan sifat hakiki seorang laki-laki.⁶⁸

Sedangkan Ibnu Katsir menerangkan bahwa supremasi laki-laki atas perempuan yaitu laki-laki merupakan imam bagi perempuan, dialah pemimpinnya, pembesarnya, dan pendidiknya karena secara inheren laki-laki memang lebih utama dan lebih

⁶⁶ “AF” selaku masyarakat Desa Pladen, di rumah responden pada 02 Februari 2024, jam 19.10-19.53 WIB, Transkrip 3

⁶⁷ “R” selaku Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Pladen dan Staff Pemerintahan di Kantor Pemerintahan Desa Pladen, pada 04 Januari 2024, jam 09.45-11.02 WIB, Transkrip 2

⁶⁸ Fakhrudin ar-Razi, Al-Tafsir al-Kabir (Tehran: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Tanpa Tahun) Juz X, hlm.88, dikutip dalam Geliat Perempuan Pasca Reformasi, Agama, Politik, Gerakan Sosial

baik oleh karena itu persoalan mengenai kenabian dan kekuasaan tertinggi hanya diberikan kepada sosok laki-laki.⁶⁹

Allah SWT menerangkan dalam Qur'an Surat Al-An'am ayat 165 "dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi dan dia juga mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikannya kepadamu."⁷⁰ Sesungguhnya tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, dia maha pengampun lagi maha penyayang." Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa Allah tidak membedakan jenis kelamin hambanya untuk menjadi khalifah dimuka bumi. Karena Allah mengatakan bahwa setiap dari kita (hambanya) merupakan seorang pemimpin. Dan setiap pemimpin mempunyai pertanggung jawabannya masing-masing.

Oleh karena itu, kepemimpinan seorang perempuan dibolehkan dalam ajaran agama Islam untuk perwujudan dari adanya kesetaraan gender. Kepemimpinan perempuan tidak menjadi sebuah masalah yang sangat berarti, karena perbedaan gender merupakan perbedaan jenis kelamin dan juga kodratnya yang dipentingkan adalah intelektualitas dan kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin perempuan. Semua itu sesuai dengan pernyataan dari para narasumber. Asalkan mereka mampu untuk mengemban amanah tersebut dengan bersifat adil, bijaksana karena semua nantinya akan dipertanggungjawabkan.

2. Menganalisis Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Pladen Tahun 2019-2025

Partisipasi politik perempuan hari ini merupakan perkara yang sangat dibutuhkan untuk mengupayakan pengintegrasian gender dalam berbagai kebijakan. Kepemimpinan ataupun politik perempuan mempunyai tujuan untuk memasukkan instrumen hukum yang sensitif terhadap gender yang selama ini terabaikan yang menyebabkan penghambatan bagi kemajuan perempuan di berbagai sektor kesempatan. Seorang perempuan yang mampu dan mempunyai dedikasi yang tinggi mengenai pembangunan maupun kemajuan dalam memimpin mempunyai hak secara

⁶⁹ Imadudin Isma'il bin Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim (Surabaya: Syirkat al-Nur, Tanpa Tahun) Juz I, hlm. 491, dikutip dalam Geliat Perempuan Pasca Reformasi, Agama, Politik, Gerakan Sosial

⁷⁰ E Sudarmanto and M A Dr. Muhammad Hariyadi, *Pencegahan Fraud Dengan Manajemen Risiko Dalam Perspektif Al-Quran* (Zahir Publishing, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=a1HKEAAAQBAJ>.

penuh untuk terjun dan masuk dalam ranah publik terutama dalam hal memimpin sekalipun dalam tingkatan terkecil dari desa.

Tahun 2019 merupakan tahun di mana desa Pladen pertama kali dipimpin oleh seorang kepala desa perempuan. Motivasi ingin mengabdikan kepada desa terkhusus ke masyarakat merupakan awalmula yang menjadi dorongan untuk Ibu Ely terjun ke dunia politik dengan menjadi seorang kepala desa pertama perempuan yang memimpin di desa pladen. Sebelum adanya kepemimpinan Ibu Ely terlebih dulu ada Ibu Sumilah yang mencalonkan diri akan tetapi kandas ditengah jalan karena keraguan masyarakat terhadap sosok pemimpin perempuan. Terdapat perspektif patriarki yang berkembang di masyarakat merupakan tantangan nyata yang bisa dirasakan oleh pemimpin perempuan.

Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan tidak menjadi masalah jika tidak menimbulkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.⁷¹ Namun pada kenyataannya, perbedaan peran mempunyai dampak. Khususnya bagi perempuan, proses eksklusif dan kemiskinan, subordinasi ekonomi dan anggapan bahwa perempuan tidak penting dalam pengambilan keputusan, telah menjadi masalah yang diakibatkan oleh kesenjangan yang tersebar di masyarakat, terutama masyarakat pedesaan.

Siti Musdah Mulia juga menjelaskan bahwa ketika perempuan menjadi pemimpin mereka tidak harus merubah dirinya menjadi seorang laki-laki, akan tetapi pemimpin perempuan juga dapat membawakan gaya kepemimpinan seperti lemah lembut dan juga mengayomi masyarakatnya dengan penuh kasih sayang yang identik dengan perempuan.⁷²

Banyaknya tantangan yang awal mula ada pada saat Ibu Ely memimpin sebagai kepala desa, tidak menyurutkan nyalinya untuk terus melangkah dan tidak putus asa. Dengan wilayah yang sering terkena banjir dan juga awal pemerintahan terdapat wabah virus covid-19 membuat ibu Ely menjadi lebih kuat untuk menjalani tantangan-tantangan kedepannya hingga sekarang ini. Dalam kepemimpinannya terdapat program-program yang ibu

⁷¹ Riza Nuzulul Huda, Umi Qodarsasi, and Umaroh Anisa Zuma, "Perjuangan Kesetaraan Gender Dalam Film Hidden Figures," *AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 8, no. 1 (2021): 64, <https://doi.org/10.21043/at-tabsyir.v8i1.11175>.

⁷² Halimatuzzahra, Laelin Farhani Azmi, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Siti Musdah Mulia."

Ely laksanakan guna memajukan desa pladen seperti pembuatan jalan usaha tani dan juga mendirikan BUMDes dengan pendampingan dari PT Djarum.

Masa kepemimpinan Ibu Elly juga lebih mengedepankan sikap demokrasi dalam pengambilan sebuah keputusan. Berlatar belakang dari ibu rumah tangga beliau lebih memilih bermusyawarah dengan para warga dan juga meminta masukan kepada para staf pemerintahan dan juga dari pemerintah kecamatan. Beliau tidak segan untuk meminta nasihat juga dari staff-staff yang bekerja lebih lama di pemerintahan desa Pladen. Meskipun berlatar belakang ibu rumah tangga namun dalam usaha memperbaiki perekonomian UMKM yang sempat terhenti karena pandemi covid-19 beliau juga membuat sebuah acara seperti bazar umkm yang di dalamnya terdapat para pedagang yang berasal dari masyarakat desa pladen sendiri.

Dalam merespon banjir dan tanggul yang sering jebol beliau selalu merespon dan bergerak dengan cepat untuk mengatasi wilayah desa Pladen yang selalu mengalami banjir. Dengan menginstruksikan para warga untuk gotong royong membuat tanggul darurat seperti batu padas yang ditaruh di kantong sak juga merupakan salah satu dedikasinya yang perlu diakui jempol dalam memimpin, beliau juga tidak segan untuk ikut turun tangan membantu para warga untuk membersihkan jalan yang terkena lumpur yang diakibatkan oleh jebolnya tanggul. Hingga untuk sekarang desa Pladen tidak mengalami banjir lagi karena sudah ada upaya dari pemerintahannya ibu eli untuk Kembali menaikkan tanggul dan mengeruk lumpur yang ada di sungai-sungai desa Pladen.

Masyarakat desa Pladen telah menyaksikan sendiri ketekunan yang dilakukan Ibu Ely selama memimpin desa Pladen terutama dalam menanggulangi banjir yang sering terjadi di Desa Pladen. Dengan jiwa keibuannya untuk mengayomi masyarakatnya, Ibu Ely selalu memantau debit air yang berada di sungai desa Pladen. Beliau tetap blusukan dan selalu berkoordinasi dengan kades dusun jawik selama musim hujan.

Dapat kita dilihat dari program kegiatan di atas yang sudah dilakukan, bahwa kepala desa pladen telah menjalankan berbagai kegiatan yang telah direncanakan pada awal menjabat sebagai kepala desa. Dari rencana kegiatan tersebut tentunya terdapat input maupun output untuk pemerintahan Desa Pladen, beserta kepala desa maupun perangkat yang telah mematuhi peraturan daerah yang telah ditetapkan yang sudah dijalankan oleh desa

pladen. Program-program kegiatan tersebut dilaksanakan untuk membawa perubahan pada desa maupun lembaga yang mempunyai tujuan mensejahterakan masyarakat.

Terdapat perbedaan antara kepemimpinan Ibu Ely dengan kepala desa sebelumnya. Di era zaman yang semakin maju dan perkembangan teknologi yang semakin canggih serta dinamis, dimanfaatkan oleh Kepala Desa Pladen sekarang untuk menginformasikan segala informasi mengenai pengembangan pemerintah Desa kepada masyarakat luas. Bukan hanya itu saja perbedaan itu terletak pada organisasi kepemudaan yang berada di desa pladen. Sesuai dengan penjelasan "AF" yang menyatakan bahwa sebelum pemerintahan Ibu Ely organisasi kepemudaan hampir tidak berjalan akan tetapi ketika ibu Ely menjabat sebagai kepala desa Klaten organisasi kepemudaan IPNU, IPPNU, Karangtaruna dan lainnya mulai aktif. Hal tersebut sesuai dengan keterlibatan para pemuda desa pladen yang turut dalam acara-acara yang terselenggara di desa pladen seperti pengajian, Expo desa, sedekah bumi dan lainnya.⁷³

Untuk mensejahterakan rakyatnya Bu Ely juga telah memasang kaca pembesar di sepanjang belokan maupun perempatan yang berada di Desa Pladen untuk menghindari adanya laka. Bukan hanya itu saja Bu Ely juga memasang cctv di setiap perempatan desa untuk memantau kondisi jalan dan juga mengawasi kendaraan yang mengalami laka di perempatan jalan yang berada di Desa Pladen.

Mengenai konsep dari kesetaraan gender yang ada pada pemerintahan Ibu Ely terdapat beberapa konsep yang sejalan dengan UUD 1945. Konsep kesetaraan gender dalam UUD 1945 tersebut meliputi:

a. Bidang Pendidikan

Setiap warga negara telah terjamin haknya untuk memperoleh pendidikan tanpa terkecuali sesuai pada UUD 1945, hak tersebut juga diperoleh oleh masyarakat desa Pladen. Dalam mengupayakan agar anak-anak di desa Pladen giat untuk bersekolah, pemerintah desa Pladen bekerjasama dengan polsek Jekulo untuk ikut memberikan semangat kepada anak-anak dari TK/RA maupun SD/MI.

⁷³ "AF" selaku masyarakat Desa Pladen, di rumah responden pada 02 Februari 2024, jam 19.10-19.53 WIB, Transkrip 3

Kerjasama tersebut guna memberikan semangat anak-anak untuk giat bersekolah, mencapai cita-citanya dan menganggap polisi sebagai pahlawan yang membantu mereka dalam situasi darurat, memberikan arahan lalu lintas serta berperan dalam keselamatan. Polisi juga sebagai figur teladan dalam bertanggung jawab sebagai profesi yang mulia untuk dicapai. Bukan hanya itu saja kerjasama antara kepolisian dengan pemerintah Desa Pladen juga untuk mengatasi bullying pada anak-anak. Karena kadang ketidak semangatannya seorang anak untuk bersekolah karena terdapat adanya rasa takut pada kawannya akibat bullying.

b. Bidang Kesehatan

Adanya penghidupan yang layak bagi semua warga negara merupakan salah satu perwujudan dari kesetaraan gender dan merupakan hak rakyat Indonesia yang harus diberikan kepada Negara. Dalam pemberian hak Kesehatan kepada masyarakat desa Pladen pemerintahan desa pladen memberikan vaksinasi secara merata kepada masyarakat desa pladen tanpa terkecuali guna untuk kekebalan tubuh agar terhindar dari virus covid-19. Bukan hanya itu saja, pemerintah desa pladen yang bekerjasama dengan Puskesmas Jekulo juga mengadakan rembuk stunting untuk mengatasi anak-anak yang terkena stunting pada masyarakat desa Pladen.

Sosialisasi penanganan stunting tersebut dari ibu-ibu yang mengandung hingga anak usia dibawah 5 tahun. Karena seperti yang kita ketahui bahwa 1000 hari kehidupan merupakan fase emas untuk mengoptimalkan pencegahan adanya stunting. Dan Langkah yang pertama untuk pencegahan stunting dimulai pada pemenuhan gizi sejak hamil. Oleh karena itu pemerintah Desa Pladen bersama dengan Puskesmas Jekulo, Bidan Desa dan juga Ibu PKK mengoptimalkan secara maksimal mengenai masalah stunting.

c. Bidang Ekonomi

Kesetaraan gender dalam bidang ekonomi juga merupakan hak yang harus dimiliki semua orang sebagai warga Negara Indonesia. Negara Indonesia menjamin akan hak warganya untuk mendapatkan kesejahteraan yang setara tanpa adanya pembeda. Masyarakat diperbolehkan untuk mengembangkan dirinya ke ranah

publik tanpa adanya perbedaan diantara warga Negara Indonesia, karena semua warga Negara Indonesia laki-laki maupun perempuan berhak atas pekerjaan yang layak.

Dalam segi ekonomi banyak dari masyarakat perempuan yang berada di Desa Pladen bekerja sebagai karyawan pada PT Djarum. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat perempuan di Desa Pladen kurang optimal karena banyak dari masyarakat perempuan yang bekerja di PT Djarum yang kita tahu bahwa masyarakat akan memilih istirahat sepulang bekerja daripada mengikuti sebuah pelatihan terlebih lagi para karyawan Djarum ini yang berangkat pagi pulang sore. Namun terdapat pemberdayaan perempuan setelah adanya covid-19 untuk memulihkan UMKM pemerintah Desa Pladen yang dipimpin oleh Ibu Ely ini juga mengadakan pasar malam dan expo desa yang didalamnya terdapat banyak penjual dari masyarakat Desa Pladen dengan mayoritas penjual adalah perempuan. Adanya pasar malam dan juga expo dijadikan sebagai tambahan pemasukan para ibu rumah tangga. Dan bagian dari pemberdayaan perempuan di Desa Pladen.

d. Bidang Kewarganegaraan

Bias gender seringkali terjadi pada perempuan, dan bias gender dikarenakan karena adanya budaya, konstruksi sosial dan juga agama. Dalam kewarganegaraan pemerintah desa Pladen memberikan hak yang sama kepada semua masyarakatnya, akan tetapi dalam pengambilan keputusan misalnya musyawarah desa atau lainnya seringkali didominasi oleh para masyarakat laki-laki. Kurangnya partisipasi perempuan dalam mengemukakan pendapat masih terbilang sangat kurang dan bisa dibilang mengalami diskriminasi bahkan hak untuk mengemukakan pendapat dalam forum umum posisi perempuan masih dipertanyakan. Perempuan seolah olah hanya sebatas pelengkap dan suaranya pasti sama dengan masyarakat laki-laki. Padahal kita tahu sendiri bahwa terdapat hak yang melekat untuk semua warga negara terjamin pada UUD 1945.

Hal tersebut merupakan masalah yang sering terjadi pada desa Pladen. Kurangnya partisipasi

perempuan dan karena terdapat perspektif bahwa suara perempuan cukup diwakili oleh laki-laki membuat suara perempuan masih menduduki posisi di bawah laki-laki. Setelah adanya pemerintahan Ibu Ely ini mulai terlihat adanya partisipasi perempuan untuk bersuara dalam menentukan kebijakan meskipun suara perempuan tersebut banyak didominasi oleh para perangkat desa perempuan.

e. Bidang Politik

Partisipasi politik merupakan hak bagi semua orang karena termasuk bagian dalam demokrasi. Dimana dalam demokrasi kesetaraan gender sangat diperhitungkan pada semua kalangan. Dalam partisipasi politik semua gender mempunyai jaminan hukum untuk ikut serta menduduki lembaga-lembaga Negara. Kesetaraan gender pada pemerintahan desa Pladen sudah tergolong memenuhi kriteria kepemimpinan yang baik, dimana para staf di pemerintahan desa Pladen terdapat tujuh staf perempuan dari 13 jabatan yang terdapat di pemerintahan desa Pladen yang membantu Ibu Ely dalam menjalankan pemerintahannya. Tiga dari staf perempuan tersebut sudah lebih dulu bekerja di pemerintahan desa dan empat dari staf perempuan merupakan staf baru yang pada 23 Februari 2024 secara resmi telah dilantik dan diambil sumpah sebagai staf pemerintahan Desa Pladen. Para staf di Pemerintahan Desa Pladen bekerja dengan tugas dan tupoksinya masing-masing serta tidak ada pembeda dalam perlakuan. Para staf baru mulai bekerja pada senin 26 Februari 2024.

Dalam pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari pemerintahan Desa Pladen terkhusus Ibu Ely tidak terlibat dalam partai apapun dan juga tidak mengukung calon manapun. Pemerintah Desa Pladen terkesan netral, dan memilih Presiden sesuai dengan hati nuraninya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Ely, bahwa dalam pemilu yang diselenggarakan tahun ini tidak ada keterlibatan pemerintah Desa Pladen dan Ibu Ely dalam kampanye maupun perkumpulan partai yang ada di Desa Pladen.⁷⁴

⁷⁴ Ely Widiastuti selaku Kepala Desa Pladen, di Kantor Pemerintah Desa Pladen pada tanggal 26 Februari 2024 jam 09.01-09.12 WIB, Transkrip 1

Dari konsep kesetaraan gender yang termuat dalam UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa semua warga Negara Indonesia laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Dengan adanya kepemimpinan perempuan juga tidak meremehkan seorang laki-laki. Pemimpin pada setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda tergantung setiap pribadi pemimpin itu sendiri. Dan Allah SWT juga sudah menerangkan bahwa setiap dari hambanya mempunyai kedudukan yang sama dan berhak menjadi khalifah atau pemimpin dan setiap pemimpin maupun perilaku mempunyai pertanggung jawaban masing-masing.

Karena agama Islam menganggap bahwa perempuan dengan laki-laki setara sebagai manusia. Dan menganggap perbedaan gender bukan sebagai diskriminasi melainkan sebatas perbedaan dalam hal tanggung jawab seperti pemberian nafkah dan juga perihal laki-laki sebagai pelindung bagi perempuan.

Kurangnya partisipasi perempuan pada forum-forum terbuka di Desa Pladen terjadi karena kurangnya pemberian ruang masyarakat pada perempuan dan itu juga yang mengakibatkan minimnya bahkan tidak adanya perempuan untuk berpartisipasi dalam politik atau memberanikan diri untuk maju dalam Pilkades di Desa Pladen. Meskipun terdapat pemimpin perempuan, tetapi adanya budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat merupakan salah satu penyebab kurangnya partisipasi perempuan dalam memberikan pendapatnya ketika musyawarah desa dan forum terbuka lainnya. Musyawarah yang sering dilakukan di malam hari membuat para perempuan lebih mementingkan mengurus anaknya daripada ikut serta dalam forum tersebut, terlebih lagi suara mereka yang terkadang dikesampingkan oleh masyarakat laki-laki.

Dapat kita simpulkan bahwasannya dalam pemerintahan Ibu Ely merupakan kepemimpinan yang dinilai sudah ideal dan mengalami banyak kemajuan untuk kepemimpinan perempuan. Dalam memanfaatkan teknologi, menghidupkan kembali organisasi kepemudaan, penanganan banjir hingga usaha untuk memulihkan UMKM dan pembangunan desa sudah banyak dilakukan oleh Ibu Ely. Dengan mempunyai dedikasi yang tinggi mengerahkan segala kemampuannya untuk membangun Desa Pladen.

Kepemerintahan Ibu Ely dalam program khusus pemberdayaan perempuan lebih konsen kepada pemberantasan stunting dan juga Kesehatan ibu dan anak. Hal tersebut terbukti adanya musyawarah rembuk stunting yang diikuti oleh ibu-ibu di

Desa Pladen. Akan tetapi terdapat evaluasi pada pemerintahan Ibu Ely untuk lebih memberikan program-program yang mengasah skill pro kepada perempuan dan juga program-program untuk merepresentasikan perempuan. Misalnya menggerakkan ibu-ibu PKK dalam pelatihan pemanfaatan tas yang berasal dari limbah plastik atau pembuatan bros dari kain perca atau lainnya. Yang mana hal tersebut nanti bisa mendapatkan nilai jual. Dan untuk pemasarannya nanti bisa dijual ketika ada pasar malam.

